

Strategi Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

Yani Veranita Br Ketaren

Florence D.J Lengkong

Very Y. Londa

yaniveranita456@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the recovery strategy after the eruption of Mount Sinabung in Karo Regency, North Sumatra Province. This type of research uses qualitative research and a descriptive approach. Data collection techniques consist of interviews and literature. This study focuses on the post-disaster recovery strategy of Mount Sinabung eruption in Karo Regency, North Sumatra Province as discussed by Phillips in (Sagala) & Lutfiana, 2015 that post-disaster recovery includes several aspects that are of concern to the government, namely the residential sector, the economic sector, the environment, infrastructure, social psychology, and public services. The results of the study show that the implementation of policies carried out by the government in the housing and settlement sectors, the economy, environmental infrastructure, psychology and public services has been going quite well. However, the psychological social sector is expected to be a concern for the government regarding the mentality of the victims of the Mount Sinabung eruption, especially children.

Key words : Strategy, Recovery, Disaster

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada strategi pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dibahas oleh Phillips dalam (Sagala) & Lutfiana, 2015 bahwa pemulihan pasca bencana meliputi beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu sektor pemukiman, sektor perekonomian, lingkungan, infrastruktur, sosial psikologis, dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pada sektor permukiman dan perumahan, perekonomian, lingkungan infrastruktur, psikologis dan pelayanan publik sudah berjalan cukup baik. Namun pada sektor sosial psikologis diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah terkait mental para korban bencana Erupsi Gunung Sinabung khususnya anak anak.

Kata kunci : Strategi, Pemulihan, Bencana

PENDAHULUAN

Bencana alam menjadi peristiwa yang tidak jarang didengar di Indoensia bahkan hingga mancanegara. Indonesia termasuk salah satu negara yang rawan terjadi bencana alam, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam bencana yang telah menimpa daerah daerah di Indonesia seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung merapi dan peristiwa bencana alam lainnya. Bencana alam yang menimpa kehidupan alam dan manusia pun menimbulkan kerugian sangat besar, baik kerugian moril maupun materil bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah terjadinya bencana. Dampak dari bencana alam yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan sosial masyarakat menjadi masalah yang serius mengingat bencana alam merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan bencana alam dapat terjadi kapan pun dan dimana pun yang dapat terjadi begitu saja. Secara geografis wilayah di Indonesia berpotensi rawan bencana mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak mengenal musim dan dapat terjadi sewaktu waktu sehingga menuntut kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana memerlukan peran pemerintah karena bencana alam bukanlah hanya sekedar masalah individu tetapi menyangkut keselamatan publik. Atas dasar itu pemerintah menetapkan Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana erupsi gunung merapi. Letusan Gunung Berapi merupakan proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut gunung berapi,

akibat aktifitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Kabupaten Karo yang terpatnya terletak di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam gunung merapi. Ibu Kota Kabupaten Karo terletak di Kabanjahe yang terletak di 77 km dari Kota Medan. Kabupaten Karo sendiri memiliki luas wilayah 2.127,25 km persegi dan terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1400 meter diatas permukaan laut. Karena pada ketinggian tersebut Kabupaten Karo menawarkan iklim yang sejuk dengan suhu berkisar 16 hingga 17 derajat celcius.

Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung merapi yang terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketinggian Gunung Sinabung ini mencapai 2.460 meter. Gunung Sinabung sendiri tercatat tidak meletus sejak tahun 1600, namun beberapa tahun silam mendadak aktif kembali dengan meletus pada tanggal 27 Agustus 2010. Gunung Sinabung mengeluarkan asap dan abu vulkanik pada 27 Agustus 2010 lalu kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010 Gunung Sinabung mulai mengeluarkan lava. Pada tahun 2013 Gunung Sinabung Meletus kembali dan berlangsung hingga 18 September 2013. Letusan ini mengeluarkan awan panas dan abu vulkanik. Hujan abu pun mencapai Kawasan Sibolangit dan Berastagi sehingga mengakibatkan ribuan warga yang tinggal di sekitar harus diungsikan ke daerah yang lebih aman. Akibat dari peristiwa ini status Gunung Sinabung dinaikkan ke level III menjadi siaga. Sehingga mengharuskan 7.266 jiwa (2.126 KK) untuk mengungsi. Akibat dari bencana ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karo. Seluas 12.399,16 Ha lahan mengalami kerusakan sehingga diperkirakan kerugian mencapai Rp.898.893.186.541,34(<http://karokab.go.id>) diakses 28 Februari 2018). Sampai saat ini

Gunung Sinabung masih dikatakan aktif dan masih mengeluarkan abu vulkanik yang sangat meresakan masyarakat Kabupaten Karo. Bencana Erupsi Gunung Sinabung ini juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Gunung Sinabung. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan pada mata pencarian masyarakat sekitar, namun juga kerusakan pada tempat tinggal mereka yang sudah tidak layak huni lagi dan ditambah daerah tersebut termasuk dalam lokasi rawan bencana, sehingga masyarakat diharuskan mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dalam hal penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui undang-undang tersebut maka lembaga dan sistem penanggulangan bencana telah mendapatkan posisi yang lebih kuat sehingga diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam melaksanakan berbagai tahap penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan. Maka pemerintah dituntut untuk memberikan penanggulangan yang baik kepada masyarakat.

Koordinasi sangat penting dalam penanggulangan bencana karena dalam pelaksanaan penanggulangan bencana satu unit organisasi tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan organisasi lainnya. Untuk menanggulangi bencana Gunung Sinabung serta mencegah jatuhnya korban pasca erupsi, perlu dilakukan berbagai upaya dari semua sektor. Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan juga non

pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat yang menjadi korban bencana tidak akan berjalan dengan baik apabila masing-masing sektor berjalan sendiri tanpa ada ikatan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan harus dikoordinasikan agar berjalan sinergi dan berdampak maksimal bagi korban bencana.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini didukung oleh beberapa referensi sebelumnya dengan penelitian kepustakaan. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan komparatif dan referensi. Juga untuk menghindari pemahaman tentang kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti merangkum hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu pertama disusun oleh Junior Herman Johannes Masikome dibawah bimbingan Florence Daicy J Lengkon dan Very Y. Londa (2018) Pemberdayaan masyarakat korban bencana banjir di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami objek penelitian dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata kata dan bahasa. Pemerintah memberikan program kebencanaan untuk mempersiapkan warga, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana agar mampu waspada dan siap siaga apabila sewaktu waktu terjadi bencana. Daerah Manado merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam potensi ancaman bencana , yang terkhusus pada penelitian ini membahas tentang banjir. Menurut data pada BPBD Manado, pada Tahun 2017 bencana banjir yang terjadi di Manado menimbulkan korban sebanyak 29.072 jiwa, diantaranya 2 luka ringan dan 1 diantaranya dinyatakan meninggal. Pasal 26 Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam

penanggulangan bencana mengingat Indonesia, termasuk Kota Manado memiliki resiko bencana alam yang cukup tinggi. Dalam pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kapasitas masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kesempatan bagi pembangunan dan pengembangan kesejahteraan hidup khususnya di Manado, dimana bencana banjir di Manado tergolong dalam kategori tinggi sehingga pada rapat koordinasi BPBD pusat dan BPBN Kota Manado mendapatkan pelatihan dan pendampingan Program Desa Tangguh dari BPBD Manado sesuai dengan tema desa tangguh bencana untuk tahun 2017 adalah banjir. Dengan dibuatnya program tersebut untuk mengedukasi masyarakat yang sebelumnya kurang memahami bagaimana cara mengantisipasi bencana banjir dan diharapkan masyarakat menjadi mengerti bagaimana cara mengevakuasi diri sendiri dan oranglain apabila terjadi bencana banjir.

2. Penelitian terdahulu kedua disusun oleh Claudia T F Lengkey dibawah bimbingan Masje Silija Pangkey dan Very Y. Londa (2020) Partisipasi masyarakat pada penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Motode penelitian ini dipilih karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan makna yang terkait dengan permasalahan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Desain kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menggungkapkan permasalahan yang dikaji. Bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Paal Dua Kota Manado mengakibatkan berbagai permasalahan yang membuat terganggunya aspek kehidupan masyarakat. Bencana banjir di Manado menyebabkan berbagai dampak seperti dampak fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sarana prasarana yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh

banjir. Selain itu, banjir di Kota Manado juga menyebabkan korban jiwa, resiko kesehatan, trauma mental, menurun nya perekonomian, terganggunya Pendidikan karena terhambatnya akses anak anak untuk pergi ke sekolah, terganggunya aktivitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Paal Dua Kota Manado. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Partisipasi dalam perencanaan dilakukan secara langsung oleh masyarakat kepada pemerintah kelurahan dan secara tidak langsung melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan usulan dalam perencanaan berupa perbaikan sarana fisik pembangunan yang rusak karena banjir.

Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara menjalankan setiap program yang ditetapkan pemerintah, memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dan organisasi sosial. Namun meskipun demikian ada juga masyarakat yang tidak berpartisipasi dan melanggar aturan untuk tidak mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai dan tidak bersedia direlokasi dari daerah yang rawan banjir.

3. Penelitian terdahulu ketiga disusun oleh Indah Putri Rahayu dibawah bimbingan Welson Y Rompas dan Salmin Dengo (2021) Implementasi kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa

kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil belum diimplementasikan secara menyeluruh yang dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara sebagian daerah yang tergolong dalam Kawasan rawan banjir di Kecamatan Singkil masih belum disentuh dan belum dilakukannya pembangunan tanggul serta normalisasi sungai sebagai bentuk pengendalian banjir di Kecamatan Singkil. Maka dari itu diharapkan perhatian pemerintah dalam pembangunan tanggul dan normalisasi sungai di Kecamatan Singkil dan adanya kesadaran dari masyarakat setempat agar tidak membuang sampah secara sembarangan yang dapat menjadi pemicu terjadinya banjir. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan banjir pemerintah kota Manado yang dikaji menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yang mencakup 6 dimensi implementasi, antara lain :

- a. Standart dan sasaran kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kota Manado.
- b. Sumber daya seperti dana atau intensif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan, serta sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan banjir.
- c. Karakteristik para agen pelaksana dalam kebijakan penanggulangan banjir
- d. Disposisi atau kecenderungan sikap para agen pelaksana (implementor) dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir.
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir.
- f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung dalam proses implementasi kebijakan.

4. Penelitian terdahulu yang keempat disusun oleh Michelle L. Kembuan dibawah bimbingan Florence Deisy Jetty Lengkong,

Helly Kolondam, dan Very Y. Londa (2018) Implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari resiko sosial yang kemungkinan akan timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (Bansos) di dalam APBN. Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 angka 15, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penyaluran dana bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Tikala ditangani oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditemani konsultan. Kelompok masyarakat buat pokmas kemudian menunjuk ketua, sekretaris, bendahara, lalu dibuatkan rekening untuk masing-masing pokmas. Bantuan dari kas daerah Kota Manado langsung ke rekening pokmas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Budi Yasin. Implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana banjir dengan memperbaiki pemukiman warga yang hancur dan sudah tidak layak untuk di tempati namun kenyataannya kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal, oleh karena itu penelitian

ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dimana dalam implementasi kebijakan dilihat dari 6 variabel yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan. Komunikasi merupakan informasi bagi pemerintah untuk menginformasikan kebijakan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti etika dan komitmen untuk membuat kebijakan ini berhasil. Kondisi sosial ekonomi dan politik adalah menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara kepada 7 orang informan, observasi secara langsung dan penelusuran dokumen yang ada kaitannya dengan kebijakan, bahkan dalam penelitian dibantu dengan adanya pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil penelitian secara umum menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala belum berjalan dengan maksimal.

5. Penelitian terdahulu yang terakhir disusun oleh Christian David Timban dibawah bimbingan Jantje Mandey dan Femmy Tulusan (2015) Efektifitas kerja pemerintah Kota Manado dalam program bantuan korban banjir di Kecamatan Wanea Kota Manado. Dalam penelitian ini menggunakan metode

kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan didukung dengan wawancara kepada informan-informan, observasi langsung, penelusuran dokumen – dokumen dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program bantuan pemerintah di Kota Manado Wanea dari perencanaan program, kualitas pelayanan atau program, penyelenggara program dan kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hasil wawancara secara keseluruhan tentang efektivitas kerja Pemerintah Kota Manado dalam membantu korban banjir di Kecamatan Wanea Kota Manado memberikan kesimpulan bahwa program bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Wanea Kota Manado cukup baik tetapi belum efektif. Efektivitas kerja pemerintah Kota Manado dalam program bantuan korban banjir di Kecamatan Wanea dinilai dari beberapa aspek dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan menunjukan bahwa program bantuan untuk korban bencana banjir Manado sudah baik namun masih kurang efektif, sementara sumber daya finansial dinilai cukup, karena hanya melihat dari bantuan untuk sementara tanpa melihat ke masa yang akan datang bagaimana warga korban bencana dapat kembali seperti keadaan yang semula. Pernyataan dari camat, kepala lingkungan, lurah yang ada mengatakan bahwa program bantuan dari pemerintah telah sesuai dengan rencana yang dibentuk untuk dapat menjangkau semua korban bencana namun dari warga itu sendiri merasa kurang efektif karena sampai saat ini masih ada warga yang masih sulit menata kembali kehidupan akibat dari bencana yang terjadi, ini disebabkan karena pemberian bantuan yang kurang efektif karena kurangnya koordinasi dan tidak tepatnya data – data korban bencana yang dimiliki oleh pemerintah.

KONSEP TEORI

Asian Disaster Reduction Center (Khambali 2017:2) mengemukakan bencana adalah suatu gangguan serius terhadap

masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktornon alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 (tiga) kategori jenis bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu :

- a) Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- b) Faktor non-alam (non natural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan
- c) Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Penanggulangan bencana atau manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis (Nurjanah, dkk 2013 : 25). Dapat disimpulkan bahwa tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mencegah dan membatasi jumlah korban, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban sehingga kerusakan dan kerugian berkurang dengan begitu fungsi fasilitas umum utama seperti transportasi, listrik, telepon akan kembali sehingga kehidupan ekonomi dan sosial korban akan berjalan seperti biasa.

Kegiatan manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Phillips dalam Sagala & Lutfiana (2015) berpendapat bahwa dalam fase penyembuhan bencana, ia menyatakan bahwa pembangunan kembali dari berbagai faktor mengkhhususkan diri pada pembangunan jangka panjang, dan penyembuhan setelah bencana terdiri dari banyak faktor yang menjadi perhatian otoritas: sektor permukiman, sistem ekonomi dan lingkungan, infrastruktur, psikologi sosial dan pelayanan publik. Berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen bencana harus saling bekerjasama dan menyamakan persepsi tentang bencana dan manajemen bencana melalui sebuah sistem atau aturan main yang disepakati yaitu sistem manajemen bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dengan menjelaskan dan mendeskripsikan penemuan dan fenomena berupa fakta dan data di

lapangan yang akan disusun secara sistematis. penelitian ini berfokus pada strategi pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dibahas oleh Phillips dalam (Sagala) & Lutfiana, 2015 bahwa pemulihan pasca bencana meliputi beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu:

1. Sektor pemukiman
2. Sektor perekonomian
3. Lingkungan
4. Infrastruktur
5. Sosial psikologis
6. Pelayanan public

Informan penelitian adalah mereka yang diharapkan memahami dan mengerti masalah penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Informan penelitian sebagai sumber informasi yang relevan, akurat, dan bermanfaat, maka dari itu peneliti menetapkan informan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo 1 orang
2. Sekertaris Dinas 1 orang
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 orang
4. Seksi Penanggulangan Bencana 1 orang
5. Masyarakat yang terdampak 2 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus pada fase pemulihan pasca bencana sebagaimana yang dikatakan Phillips dalam (Sagala & Lutfiana, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Sektor Permukiman dan Perumahan

Terdapat beberapa desa yang mengalami kerusakan yang cukup parah dikarenakan lokasinya yang cukup dekat dengan Gunung Sinabung dan ditetapkan sebagai daerah yang rawan. Kerusakan ini juga berimbas pada permukiman atau tempat tinggal penduduk yang rusak

bahkan sudah tidak layak huni lagi. Tidak hanya kerusakan pada tempat tinggal penduduk, kerusakan juga terjadi pada lahan pertanian yang dimana merupakan mata pencarian sebagian besar penduduk. Maka dari itu untuk meminimalisir dampak negatif bencana erupsi Gunung Sinabung pemerintah merelokasi masyarakat ke daerah yang dianggap lebih aman. Siosar pun dipilih untuk menjadi tempat Kawasan relokasi. Pemenuhan Kebutuhan untuk Pemulihan Sektor Permukiman meliputi Subsektor Perumahan dan Prasarana Lingkungan sejumlah 220 KK terhadap 4 Desa (Gurukinayan, Kutatonggal, Brastepu dan Gamber) berhak mendapatkan Stimulan dalam rangka relokasi beserta pendampingan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah pun memfasilitasi relokasi ini, penduduk terdampak diberikan rumah sebagai tempat tinggal di Kawasan Relokasi Siosar, dan juga lahan untuk masyarakat bertani mengingat sebagian besar masyarakat yang terdampak mayoritas sebagai petani. Rumah dan lahan yang diberikan ini pun menjadi hak milik, hak milik yang dimaksud adalah hak turun temurun, terkuat dan penuh yang berarti tidak mudah terhapus dan mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, pemerintah juga memberikan sertifikat kepada masyarakat sebagai tanda atau keterangan tertulis dan tercetak sebagai bukti kepemilikan.

2. Ekonomi

Selain memberikan tempat tinggal kepada masyarakat yang terdampak, pemerintah juga memberikan lahan untuk bertani seluas 0,5 Ha kepada masyarakat yang akan direlokasi dengan system pinjam pakai. Hal ini berarti hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola lahan pertanian ini adalah hak pakai. Menurut pemerintah Kabupaten Karo system pinjam pakai ini ditargetkan selama 20 tahun lamanya, setelah itu

akan dilakukan kajian ulang terhadap kebijakannya. Masyarakat yang terdampak juga diberikan sejumlah dana sebagai modal mereka untuk melanjutkan usaha mereka. Selain itu, dengan kondisi geografis Kawasan Relokasi Siosar yang menawarkan udara yang sejuk serta pemandangan alam yang indah pemerintah juga melihat Kawasan Siosar ini berpotensi menjadi destinasi wisata baru di Sumatera Utara, baik itu wisata agro ataupun wisata alam yang tentunya dapat menjadi alternatif mata pencarian masyarakat yang akan berpindah ke Kawasan Relokasi Siosar. Dengan dibangunnya Kawasan wisata di daerah ini diharapkan dapat mengundang lebih banyak wisatawan yang datang sehingga dapat berdampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah memperoleh pendapatan melalui pajak retribusi yang dapat memulihkan perekonomian pemerintah Kabupaten Karo.

3. Lingkungan

Di Kawasan Relokasi Siosar juga telah dibangun fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, masjid, puskesmas, gereja, serta balai desa. Pembangunan ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan dasar agar masyarakat agar masyarakat menjadi nyaman untuk dapat tinggal di lokasi ini. Pembangunan ini juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman tanpa harus menempuh jarak jauh untuk beribadah atau melakukan pemeriksaan kesehatan.

4. Infrastruktur

Pasca krisis terjadi adalah setelah erupsi gunung sinabung sudah terakumulasi. Dalam situasi seperti ini pemerintah kabupaten karo berusaha untuk memulihkan dan memperbaiki apapun yang terdampak oleh erupsi gunung sinabung. Ada 2 upaya yang dapat

di lakukan oleh pemerintah kabupaten karo dalam menangani pasca erupsi gunung sinabung, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan tahap pemulihan dan perbaikan segala aspek pelayanan publik sampai sarana dan prasarana hingga tingkat yang memadai di wilayah bencana. Secara umum pemulihan dalam sektor infrastruktur adalah membangun kembali dengan kualitas lebih baik terhadap aset yang rusak pada sektor transportasi dan SDA, selain memperbaiki aset yang rusak, kebutuhan infrastruktur menuju daerah relokasi juga perlu dipenuhi. Adapun upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi pemulihan kebutuhan sub sektor transportasi dan sub sektor energi, pemulihan kebutuhan sub sektor transportasi, sub sektor energi, sub sektor air dan sanitasi dan sub sektor ruang terbuka hijau. Prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur diantaranya adalah pembangunan jembatan dan pembangunan jalan dan bangunan pendukung akses daerah relokasi mandiri, pembangunan jaringan energi listrik, penerangan jalan utama. Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur pada relokasi di siosar diantaranya adalah peningkatan jalan ke daerah relokasi, pemasangan jaringan distribusi energi listrik. Kebutuhan lainnya adalah peningkatan sarana dan prasarana mode transportasi dan pembangunan system penyediaan air minum serta pembangunan sarana ruang terbuka hijau.

5. Sosial Psikologis

Bencana erupsi Gunung Sinabung memberikan dampak bagi masyarakat dan pariwisata di Kabupaten Karo. Tidak hanya warga setempat, pariwisata di Kabupaten Karo cukup terkena imbasnya. Selain menyebabkan kerusakan atau kerugian materil bencana ini juga

menimbulkan kecemasan bagi masyarakat dan calon wisatawan yang akan berkunjung. Orang-orang tentunya akan memilih suatu destinasi pariwisata yang menurut mereka aman untuk dikunjungi sedangkan dalam hal ini daerah Kabupaten Karo dapat dikatakan tergolong menjadi daerah yang rawan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Karo pun kemudian melakukan upaya-upaya untuk membangun kembali rasa percaya dan rasa aman kepada masyarakat dan calon wisatawan yang akan datang berkunjung. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem pengawasan terhadap aktivitas Gunung Sinabung dalam hal ini bekerjasama dengan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) dan instansi-instansi terkait lainnya agar dapat mengetahui aktivitas Gunung Sinabung dan dapat mencegah terjadinya hal negatif yang mungkin dapat terjadi. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Karo juga bekerjasama dengan influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata kabupaten Karo agar dapat menjangkau wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah ini.

6. Pelayanan Publik

BPBD Kabupaten Karo dibentuk pada tahun 2014, hal ini merupakan suatu langkah inisiatif yang dilakukan oleh Pemkab Karo dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain:

A. Tahap pra bencana (Tahap Pencegahan dan Mitigasi)

Tahap pencegahan dan mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak resiko bencana.

Ada beberapa kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahap ini, antara lain:

- a. Membuat peta atau denah wilayah yang rawan bencana
- b. Membuat alarm bencana
- c. Membangun bangunan yang tahan terhadap bencana
- d. Memberi penyuluhan ataupun edukasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Kemudian menjelang sebuah bencana akan terjadi maka dilakukan tahap kesiapsiagaan. Pada tahap ini alam sudah menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahap ini diharapkan seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana tersebut. Secara umum ada beberapa kegiatan pada tahap kesiap siagaan, antara lain:

- a. Menyusun rencana pengembangan sistem peringatan pemerintahan persediaan dan pelatihan personil.
- b. Menyusun langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang.
- c. Melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan pada saat terjadinya bencana.

B. Tahap Tanggap Darurat (Dilakukan saat terjadi bencana)

Pada tahap ini dilakukan pada saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan tanggap darurat yang secara umum dapat berlaku pada semua jenis bencana, antara lain:

- a. Menyelamatkan diri dan orang terdekat
- b. Jangan panik

- c. Untuk dapat menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu
- d. Lari dan menjauh dari pusat terjadinya bencana
- e. Lindungi diri dari benda-benda yang mungkin dapat melukai diri

C. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini dilakukan setelah terjadinya bencana. Ada beberapa kegiatan pada tahapan ini, antara lain:

a. Bantuan Darurat

Mendirikan pos komando, berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana dan pemberi bantuan lain, mendirikan tenda, dapur umum, pos kesehatan, pos koordinasi, mendistribusikan obat-obatan, pakaian, bahan-bahan makanan, mencari dan menempatkan korban di tenda atau pos pengungsian, membantu petugas medis untuk pengobatan dan pengelompokan korban, mencari, mengevakuasi, dan memakamkan korban yang meninggal.

b. Inventarisasi Kerusakan

Pada tahap ini dilakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi, baik dalam segi bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian dan lain sebagainya.

c. Evaluasi Kerusakan

Tahap ini dilakukan untuk membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang sudah dilakukan.

d. Pemulihan (Recovery)

Tahap ini dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik tetapi juga pada korban yang terkena dampak dari bencana diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental.

e. Rehabilitasi

Mulai merancang tata ruang daerah dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh

komponen masyarakat terutama masyarakat korban bencana dalam pemetaan wilayah bencana, menyusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan, menyiapkan lahan dan permukiman yang tetap, merelokasi korban dari tenda penampungan, mulai melakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana, melakukan perbaikan fasilitas umum, melakukan pelatihan kerja praktis dan menciptakan lapangan kerja, melakukan pembangunan atau perbaikan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, fungsi pos komando dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi dan pendampingan.

f. Rekonstruksi

Kegiatan ini dilakukan ini dengan program jangka menengah dan jangka Panjang untuk perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

g. Melanjutkan Pemantauan

Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan terus menerus untuk meminimalisir dampak bencana susulan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pada sektor permukiman dan perumahan sudah berjalan cukup baik. Perelokasian masyarakat yang menjadi korban dalam erupsi Gunung Sinabung juga berjalan dengan baik.
2. Berbagai kebijakan sudah dilakukan pemerintah untuk membantu dan memberi kenyamanan kepada masyarakat yang terdampak dalam bidang perekonomian. Seperti memberikan tempat tinggal, lahan

untuk bercocok tanam, bantuan dana untuk melanjutkan usaha, serta pembangunan destinasi pariwisata di lokasi relokasi yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

3. Pembangunan fasilitas umum di Kawasan relokasi ini sudah tergolong cukup baik, mulai dari pembangunan tempat ibadah, sudah dibangun beberapa tempat ibadah seperti Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Siosar, Gereja Oikumene Bahtera Kasih Siosar, Gereja Katolik Siosar, Gereja Katolik Kerahiman Ilahi Puncak 2000, dan Masjid Al Hikmah Siosar. Di Kawasan ini juga dibangun balai desa, puskesmas, dan sekolah. Namun sekolah yang dibangun di Kawasan ini masih Sekolah Dasar, sehingga untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA masyarakat harus mencari sekolah atau menyekolahkan anak mereka ke luar dari daerah relokasi siosar.

4. Infrastruktur

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani pasca bencana erupsi Gunung Sinabung pada sektor infrastruktur sudah cukup baik namun dalam hal transportasi, angkutan umum yang bisa sampai ke daerah relokasi siosar masih sangat minim.

5. Sosial Psikologis

Pengimplementasian kebijakan ini juga sudah cukup baik karena dilihat dari masyarakat yang sudah bisa tinggal di tempat yang jauh lebih aman dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Tanah Karo termasuk ke objek wisata di Siosar. Namun pemerintah mungkin melupakan satu hal, bencana erupsi Gunung Sinabung ini jelas menimbulkan ingatan yang jelas bahkan trauma bagi korban bencana erupsi baik anak anak maupun orang dewasa, namun belum dilihat kebijakan oleh pemerintah dalam memulihkan mental bagi masyarakat yang terdampak khususnya anak anak.

6. Pelayanan Publik

Pada saat terjadinya bencana erupsi Sinabung BPBD sangat berpartisipasi dalam membantu

dan memberikan pelayanan dengan sigap kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Karo juga sudah memberikan kinerja yang cukup baik

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran penulis agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan seperti di bawah ini :

1. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti hendaknya pemerintah membangun Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sehingga dalam hal menempuh pendidikan masyarakat tidak harus menempuh jarak yang jauh apalagi ditambah dengan masih kurangnya angkutan umum yang sampai ke Siosar bahkan terbilang tidak ada sehingga ini jelas menyulitkan masyarakat apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

2. Kemudian dalam sektor sosial psikologis, bagi mereka yang melihat jelas secara langsung kejadian erupsi ini

tentunya akan menimbulkan trauma tersendiri baik itu bagi orang dewasa maupun anak anak, maka dari itu diharapkan membuat kebijakan yang dapat membantu masyarakat setidaknya untuk membantu mereka untuk meringankan sedikit trauma yang di alami mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Army.2015.*Post-Disaster Housing Reconstruction in Indonesia: Review and Lessons From Aceh, Yogyakarta, West Java and West Sumatera Earthquakes*. 8(1), 78-85.
<https://doi.org/10.1007/978-4-431-54255-1>.
- Arsyad, M. 2017. Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. Bandung: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi.

- Awalia, V., Mappamiring., Aksa, A. 2015. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Heryati, S. 2020. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintah Dan Keamanan Publik*.
- Kembuan, M., Lengkong, F., & Kolondam, H. 2018. Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Di Kecamatan Tikala Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Kholil, Setyawan & Ramli. 2019. Bencana Gempa Bumi di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (Disaster Communication in 4.0 Era : Review Earthquake Disaster Mitigation in Lombok West Nusa Tenggara). 11(1) 0-3. <https://doi.org/10.9734/AJEE/2019/v11i130128>.
- Kurnia. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Jurnal*, 1(1) 76-91. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.
- Lengkey, C., Pangkey, M., & Londa, V. 2020. Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89).
- Mesikome, J., Lengkong, F.D., & Londa, V. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Banjir Di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65).
- Rahayu, I., Rompas, W., & Dengo, S. 2021. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).
- Sagala, S & Lutfiana. 2015. Manajemen Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat 2009.
- Timban, C., Mandey, J., & Tulusan, F. 2015. Efektivitas Kerja Pemerintah Kota Manado Dalam Program Bantuan Korban Banjir Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Ziqiang, Han. 2017. Recovering From Catastrophic Disaster in Asia. <https://doi.org/10.1108/S2040-7262201600000180001>.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana